

# PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG

Nifi Lamingthon<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tamansiswa  
Jl. Taman Siswa No.261,20 Ilir Timur 1 Palembang Kode Pos 3012  
Email : [nifilamingthon83@gmail.com](mailto:nifilamingthon83@gmail.com)<sup>1)</sup>

## ABSTRACT

*The development plan in the Sub-District Government apparatus by the Sub often doesn't run as expected. The participation of all parties in the development of the area of the district is absolutely decisive, because after all the potential area that owned if less grasp implementation alignment apparatus development, sub-district development goals by itself will not be achieved as expected. The subdistrict is part of local governance which he supervises several wards and is headed by a Head, has a duty as executor cantonal techniques that have a specific work area and also has a function.*

**Keywords:** Head, development, Good Government

## 1. Pendahuluan

Setiap individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki peran aktif yang sangat mempengaruhi dalam melakukan kontrol untuk menunjang kinerja pemerintah. Pembangunan yang sudah di rencanakan di tingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana di harapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kecamatan adalah perangkat Pemerintah wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa/kelurahan menurut Y.W Sunindia SH dan Dra. Ninik Widayanti (1987: 63). Adapun yang menjadi aspek dalam pembangunan kecamatan terdiri dari beberapa bidang yaitu: Bidang pemerintahan, Desa dalam suatu wilayah kecamatan, Ekonomi, Sosial budaya, Pembangunan Masyarakat Desa, keamanan dan ketertiban wilayah. Dalam berbagai bidang pembangunan di atas merupakan satu koordinasi dan tanggung jawab dari kecamatan. Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan dikepalai oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program kerja kecamatan.
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis kecamatan.
3. Penyelenggaraan tugas umum pemerintah meliputi pengkoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan,

penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.

4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja terkait.

### A. Kerangka Konseptual

#### 1) Konsep Peran

Secara Estimologis kata peran artinya: pemain sandiwar, tukang lawak. Kata "Peran" biasanya diberi akhiran "an" maka menjadi "peranan" yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan terutama atau karena hal atau peristiwa, Poerwadarminta W.J.S (1993:735). Dengan demikian kata "peran" berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa. Jack C. Plano (1994: 20), mengemukakan bahwa peranan atau "Role: yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

#### 2) Konsep Camat

Menurut Bayu Suryaningrat (1981) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah Kecamatan yaitu pengendalian pembangunan. Di samping itu juga Camat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa :

1. Kecamatan di bentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian

wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintah sDesa dan/atau Kelurahan.
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

4. Kepala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atau usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Camat dalam hal menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota;

6. Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Camat.

7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota

### 3) *Konsep Pembangunan*

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu paling tepat mengartikan pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan marksis, modernisasi dan lain-lain. Pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utama yang perlu diketahui dalam pembangunan yaitu :

1. Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah
2. Terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada beragaman dalam seluruh aspek kehidupan.

3. Mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. (Nugroho dan Danuri 2004:9)

### 4) *Konsep Kecamatan*

Wilayah kecamatan mempunyai batas-batas tertentu, wilayah ini ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan dibawah Kabupaten yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 :

1. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

### B. *Metodologi Penelitian*

#### 1) *Jenis Penelitian*

Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu jalur yang baik, maka dibutuhkan suatu metodologi. Menurut W. J. S Poerwadarminta (1993: 649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi pada dasarnya dalam menguraikan suatu maksud tertentu, perlu ada cara atau jalan yang jelas dan teratur, terarah melalui daya pikir yang logis juga.

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2001: 17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan.

#### 2) *Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional*

Sesuai dengan judul serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka variabel yang diteliti adalah: variabel peran camat dalam pembangunan kecamatan sebagai variabel terikat.

- a. Variabel bebas peran pembangunan dimaksudkan adalah kesatuan usaha atau kesatuan tindakan yang berkaitan dengan program pembangunan kecamatan (baik dalam perencanaan maupun implementasinya) yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah ditingkat kecamatan baik vertikal maupun horizontal atau dinas-dinas daerah yang langsung bekerjasama dengan camat sebagai kepala wilayah atau administrator pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- b. Variabel terikat, keberhasilan pembangunan kecamatan dimaksudkan adalah tercapainya atau terselenggaranya program-program atau proyek-

proyek pembangunan oleh instansi-instansi pemerintah (vertikal maupun horizontal) itu sendiri maupun program/proyek-proyek terpadu yang dilaksanakan bersama oleh instansi yang ada maupun juga program-program yang dilaksanakan bersama oleh instansi pemerintah kecamatan yang ada dengan pemerintah.

Indikator-indikator pengukuran keberhasilan pembangunan kecamatan tersebut diukur dari hal-hal seperti:

1. Dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap implementasi program pembangunan kecamatan tersebut,
2. Terselenggaranya program/proyek pembangunan kecamatan sesuai rencana yang telah ditetapkan,
3. Tercapainya sasaran dari setiap program terutama kemanfaatannya bagi kecamatan.

### 3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Seberang Ulu 1 Palembang. Jln. KH. Wahid Hasyim No. 72, Palembang, Sumatera Selatan 30255, Indonesia.

### 4) Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. (Arikunto S. 1997: 115). Populasi yang ada di dalam kantor kecamatan berjumlah 45 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2001: 57). Sesuai dengan judul penelitian yang diambil untuk menjadi sampel adalah aparat pemerintah yang ada dalam kantor kecamatan Seberang Ulu 1 berjumlah 45 orang.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, digunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu:

1. Data sekunder atau penelitian kepustakaan
2. Data yang diperoleh melalui studi pustaka yaitu langsung mengambil data dari sejumlah buku-buku dengan cara membaca dan mempelajari literature yang berhubungan dengan judul penelitian ini serta perundang-undangan yang menyangkut judul penelitian ini.
3. Data primer judul penelitian lapangan  
Data penelitian ini dapat diperoleh dari :
  - a. Kuesioner atau daftar pertanyaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan
  - b. angket atau kuesioner kepada mereka yang mengetahui tentang koordinasi sebagai salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pembangunan kecamatan di kecamatan Seberang Ulu 1
  - c. Interview atau wawancara yaitu dengan melakukan wawancara baik wawancara bebas maupun wawancara mendalam kepada para informan dan responden yang dianggap tahu tentang peran camat sebagai salah satu faktor

penunjang dalam keberhasilan pembangunan kecamatan, di kecamatan Seberang Ulu 1.

- d. Pengamatan atau observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana peran camat sebagai salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pembangunan kecamatan di kecamatan Seberang Ulu 1.

### D. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan di deskripsikan sesuai dengan yang dijadikan indikator-indikator dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat perbandingan suatu variabel, maka dapat dilakukan dengan bantuan perhitungan presentase (table) dengan berpatokan pada rumus sebagai berikut :

$$P = F/N \times 100\%$$

Dimana :

P : Presentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Sampel

## 2. Pembahasan

### A. Peran Camat Sebagai Pelaksana Pemerintahan Di Kecamatan

Administrator pemerintahan berpatokan pada petunjuk yang sudah di berikan yakni para Kepala desa yang ada menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat, sehingga program kerja yang dilakukan oleh camat adalah perlu melakukan pembinaan bagi setiap kepala-kepala desa secara terpadu beserta aparatnya guna mendapatkan masukan dari desa yang ada dalam wilayah kecamatan Seberang Ulu 1.

Dari tahun ketahun dengan adanya pembinaan yang intensif yang dilakukan oleh camat maka kelurahan yang ada di wilayah Seberang ulu 1 turut membenahi diri bahkan setiap kali dilakukan penataran bagi sekretaris kelurahan maka kecamatan Seberang Ulu 1 juga di ikut sertakan yakni menambah bekal pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi kelurahan. Pada pihak lain usaha yang di lakukan oleh pihak camat dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maka ia turut bekerja sama dengan instansi vertikal, horisontal dan non departemen, sehingga unsur tripika turut mendapat perhatian yang sangat penting. setiap saat untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pemerintahan dengan baik dari berbagai instansi, maka camat selalu melakukan rapat koordinasi.

Rapat koordinasi ini sangat diperlukan guna mendapatkan masukan dari berbagai instansi yang ada dalam wilayah Seberang Ulu 1 sehingga setiap kali ada permasalahan yang muncul selalu dapat diselesaikan dengan apa yang diharapkan. Penataan administrasi desa juga cukup mendapatkan perhatian dalam program yang dilakukan oleh camat sehingga setiap kali dilakukan lomba penataan administrasi kelurahan juga mendorong

setiap staf administrasi yang ada di desa guna mengintensifkan pelaksanaan administrasi.

Selain itu para staf administrasi desa diupayakan untuk melakukan studi banding dengan Desa lainnya yang sudah berhasil dengan baik dalam wilayah Seberang Ulu 1 maupun kecamatan lainnya.

Gambaran peran camat sebagai pelaku tugas-tugas pemerintahan di kecamatan Seberang Ulu 1 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.** Peranan Camat sebagai Pelaksana Pemerintahan di Kecamatan Seberang Ulu 1

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	35	0,778
Cukup Baik	7	0,155
Kurang Baik	3	0,066
	45	0,999

Dari gambaran data diatas maka peran camat sebagai pelaku tugas-tugas pemerintahan di wilayah Seberang Ulu 1 ternyata dari 45 responden yang di wawancarai menyatakan : 35 orang atau 0,778 % peranan camat itu baik, sementara 7 orang atau 0,155 % menyatakan bahwa peranan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, sedangkan sisanya 3 orang atau 0,066 % menyatakan peranan camat kurang baik. Kesimpulan yang dapat di tarik dari data tersebut di atas ternyata camat memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

**B. Peran Camat Sebagai Pelaksana Tugas-Tugas Pembangunan**

Salah satu usaha yang masuk dalam penyelenggaraan program yang dilakukan oleh camat adalah menyangkut program pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Sebab camat memiliki peranan yang penting sebagai administrator di bidang pembangunan, antara lain pengarahan usaha dan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan guna membantu kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan. Pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penggalan sumber- sumber pendapatan daerah secara resmi yang sah untuk menunjang pembangunan daerah. Menyangkut penggalan sumber-sumber kekayaan juga turut menjadi target program camat dengan mengintensifkan semua potensi yang ada di tiap-tiap kelurahan, sehingga di harapkan akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Gambaran sejauh mana peran camat sebagai pelaku tugas-tugas pembangunan maka akan di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Peran Camat Sebagai Pelaku Tugas Pembangunan

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	34	0,755
Cukup Baik	9	0,2
Kurang Baik	2	0,044
	45	0,999

Kesimpulan yang dapat di ambil dari data tersebut di atas ternyata camat memiliki peran yang cukup baik sebagai pelaku tugas-tugas pembangunan.

**C. Peran Camat Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat**

Dengan berpatokan pada apa yang menjadi wujud nyata dari tugas yang dilakukan oleh seorang camat, maka tentunya akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka segala apa yang dicanangkan oleh camat tentu tidak akan berhasil dengan sebaik-baiknya. Walaupun secara teoritis camat memiliki kewibawaan yang tinggi di dalam masyarakat, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan tugas yang di emban kepadanya tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka tugas yang dilaksanakan kepadanya akan selalu terbengkalai. Sehingga keberhasilan pembangunan juga akan ditentukan oleh kemampuan camat. Di satu pihak perlu mendapatkan dukungan. Di pihak lain, yakni para masyarakat perlu memberikan partisipasi secara nyata.

Gambaran bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.** Peranan Camat Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	36	0,8
Cukup Baik	8	0,177
Kurang Baik	1	0,022
	45	0,999

Dari gambaran data diatas dapat disimpulkan bahwa peranan camat dalam menggerakkan masyarakat adalah baik namun penulis teliti lebih lanjut bentuk partisipasi yang paling besar dalam pembangunan adalah tenaga. Tapi pada kenyataannya juga masyarakat sudah menyadari bahwa partisipasi untuk menyalurkan pendapat, termasuk ide, buah pikiran termasuk pengambilan keputusan serta partisipasi harta benda mendapat perhatian yang sangat penting.

**D. Kinerja Aparatur Kecamatan**

Untuk mengetahui kinerja aparatur kecamatan penulis membuat daftar pertanyaan kepada responden untuk mengukur tentang kinerja aparatur kecamatan, dimana pertanyaan itu adalah:apakah pemerintah mempunyai kemampuan menyusun perencanaan pembangunan / kegiatan tertentu dalam desa terdiri kemampuan untuk menggali, menggerakkan dan memadukan berbagai sumber potensi yang merupakan masukan dari lingkungan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dari pembangunan masyarakat di desa dan “apakah pemerintah mampu menjamin terlaksananya pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan masyarakat ?”, Sejauh mana tingkat kinerja aparatur desa dan kecamatan dalam wilayah Kecamatan Seberang Ulu 1. Sesuai dengan hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.** Kinerja Aparatur Pemerintah di Kecamatan Seberang ulu 1

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	40	0,888
Cukup Baik	5	0,111
Kurang Baik	0	0
	45	0,999

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata kinerja aparat Kecamatan dapat dikatakan sudah baik yakni 40 responden atau 0,888 % terkategori baik, sementara sisanya sebanyak 5 responden atau 0,111 % terkategori sedang.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut diatas ternyata kinerja aparatur Kecamatan sudah memiliki kemampuan yang baik atau tinggi dalam penyelenggaraan program pemerintah.

#### E. Peran Camat terhadap disiplin Aparatur Pemerintah

Faktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah disiplin aparatur, agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Disiplin kerja menjadi tolak ukur dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang efektif, maka disiplin aparatur pemerintahan kecamatan yang berada di Kecamatan Seberang Ulu 1. Seperti datang ke kantor tepat waktu, meninggalkan kantor sesuai jam yang telah ditentukan, penyelesaian tugas-tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan, dan lain sebagainya. Apabila camat melaksanakan dengan baik dan benar tentang disiplin bagi aparatnya, pastilah pelaksanaan tugas pekerjaan dapat berjalan efektif, tertib dan lancar.

Untuk mengetahui sejauh mana ketaatan aparatur terhadap disiplin kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Seberang Ulu 1, berikut ini akan diberikan hasil penilaian responden terhadap disiplin aparatur Kecamatan.

**Tabel 5.** Peranan Camat Terhadap Disiplin Aparatur Pemerintah di Kecamatan Seberang Ulu 1

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	35	0,777
Cukup Baik	5	0,111
Kurang Baik	5	0,111
	45	0,999

Dari gambaran diatas tentang ketaatan terhadap disiplin kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas camat dalam penyelenggaraan pembangunan di kecamatan Seberang Ulu 1, ternyata dari 45 responden, ada 35 responden atau 0,777 % menyatakan kategori tinggi, 5 responden atau 0,111 % menyatakan sedang, dan sisanya sekitar 5 responden atau 0,111 % menyatakan rendah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut diatas ternyata aparatur pemerintah sangat taat terhadap peraturan yang di implementasikan dengan disiplin waktu dan disiplin kerja dalam aktifitasnya sehari-hari.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Camat adalah pelaksana tugas-tugas pembangunan sesuai hasil penelitian adalah cukup baik, dimana dengan munculnya jawaban responden yang menyatakan bahwa Camat di Kecamatan Seberang Ulu 1 mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
2. Kinerja aparatur kecamatan dinilai sudah memiliki kemampuan yang baik hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa aparatur Pemerintah yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 1 sudah baik, dengan alasan dapat dilayaninya semua kepentingan masyarakat, hal ini juga sejalan dengan prinsip sebagai pelayan masyarakat.
3. Untuk pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang ada pada aparat kecamatan Seberang Ulu 1 masih terkategori sedang hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya, hanya separuh dari jumlah aparat pemerintah kecamatan Seberang Ulu 1 yang dapat menyelesaikan pendidikan sarjana atau pada jenjang Perguruan Tinggi.

#### Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan hasil penelitian ini, dimana camat mampu mengakomodir semua keperluan masyarakat, maupun aparat yang ada di kecamatan, diharapkan agar peran yang dimainkan oleh camat dapat lebih ditingkatkan, dalam artian mengingat masa jabatan camat yang tidak ditentukan, sekiranya apabila ada pergantian camat, maka camat yang baru diharapkan dapat lebih meningkatkan profesionalisme serta mampu untuk mengemban tugas-tugas pemerintahan.
2. Camat selaku pemimpin di kecamatan sekiranya dapat memberikan pembinaan kepada bawahan, agar dapat meningkatkan kualitas bawahan yang nantinya akan berdampak pada pelaksanaan kerja dan keberhasilan kerja yang efektif dan efisien.
3. Perlu lebih mengintensifkan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan memberikan bekal pengetahuan bagi aparatur pemerintah yang ada di kelurahan seperti melakukan pembinaan administrasi dan perlunya menegakkan disiplin.

#### Daftar Pustaka

- Bayu Suryaningrat, 1981, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Bintoro Tjokroamojo, 1984, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Beratha I Nyoman, 1982, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Jack C. Plano, 1994, *Peran Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT. Bina Aksara.

- Liang Gie, 1978, *Pengertian Kependudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta, Karya Kencana.
- Nugroho Iwan dan R. Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI.
- Poerwadarminta W.J.S, 1993, *Peran Masyarakat Desa*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Siagian, S.P. 1978, *Peranan Staf dalam Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Siagian S.P, 1984, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Sujadmoko, 1971, *Problem dan Proses Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Prisma.
- Sugiyono, 2001, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta.
- Tjokroamidjodjo dan Mutopadidejaja A.R, 1980, *Teknik Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Karya Kencana.
- Westra Pariata, 1983, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Widjaya A.W, 1991, *Etika Pemerintahan*, Jakarta, Bina Aksara.

**Sumber-sumber lain :**

- Ensiklopedia Nasional Indonesia 1990, *Balai Pustaka*, Jakarta.
- UU No. 22 Tahun 1999, 2001. *Otonomi Daerah Tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit CV. Tamita Utama Jakarta.
- UU No. 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Citra Umbara. Bandung.
- [www.Google.com](http://www.Google.com)